



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 009/15012009
HARI : KAMIS
TANGGAL : 15 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	RI-Belanda Tanda Tangan Perjanjian Kemitraan Komprehensif	3
	RI: Penandatanganan Ekstradisi RI-China Tunggu Waktu	3
	Kerjasama Pendidikan RI-Rusia Ditandatangani	4
	Hillary Clinton recognizes Indonesi's economic role	5
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Usulan Perubahan UUD Perlu Dibawa ke Publik	5
	MPR: Segera Keluarkan Israel dari PBB	6
	B. EKONOMI	
	15 Januari Harga BBM Turun Lagi	7
	C. SOSBUD	
	Guruh Gunakan Musik sebagai Alat Perjuangan	7
	D. HANKAM	
	UNIFIL Tingkatkan Kewaspadaan	8
	E. HUKUM	

		Hari Ini Hakim Agung Pilih Ketua MA	8
		Depkumham Selidiki Kaburnya Tahanan Imigrasi NTT	9
		KPK Selidiki Aliran Dana Bapertarum	10
		DPR Janji Tak Ulur-ulur RUU Tipikor	10
		Sisminbakum Kembali Dijalankan	11
		Jampidsus Nilai Peraturan Menteri Langgar Hukum	11
	F.	OLAHRAGA	
		Simon Perpanjang Rekor Kemenangan	12
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
	1	RI's emissions have decreased	13
	III.	ARTIKEL	
		Australia Puji Demokrasi di Indonesia	14
	IV.	LAIN-LAIN: Tidak Ada	
	V.	EDITORIAL	
		Pengawasan Partai Politik Pengawasan Partai Politik	15
		Mungkinkah Petinggi Israel Dihukum?	16
		Ujian Nasional dan Tiket Masuk ke PTN	17

Jakarta, 15 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. RI-Belanda Tanda Tangan Perjanjian Kemitraan Komprehensif

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan Wirajuda dan timpalannya, Menlu Kerajaan Belanda Maxime Jacques Marce Verhagen, Rabu, menandatangani Perjanjian Kemitraan Komprehensif untuk meningkatkan hubungan dwipihak kedua negara.

"Dengan Perjanjian Kemitraan Komprehensif ini kita maksudkan komitmen dua negara untuk memperluas aspek-aspek hubungan dwipihak dua negara," kata Menlu Hassan Wirajuda di Gedung Pancasila Jakarta, Kamis.

Menurut Hassan, dokumen tersebut selanjutnya akan ditandatangani oleh masing-masing kepala pemerintahan dalam waktu dekat, tanpa menyebutkan waktu yang pasti.

Mengingat hubungan kedua negara yang bersejarah, kata Hassan, kunjungan Verhagen menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam membangun kemitraan komprehensif.

Sementara itu, Verhagen mengatakan mengingat hubungan bersejarah dan spesial yang dimiliki kedua negara, maka lawatannya ke Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan hubungan baik yang telah tercipta.

Ia juga mengatakan bahwa Belanda mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target-target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) dan upaya Indonesia menggagas Forum Demokrasi Bali.

Ini adalah kunjungan resmi pertama Melu Verhagen ke Indonesia, namun sebelumnya ia telah beberapa kali bertemu dengan Hassan di sela-sela sejumlah pertemuan internasional.

Seusai bertemu Hassan, Verhagen melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Verhagen melakukan lawatan ke Indonesia 13-17 Januari 2009. Ia juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Yogyakarta dan bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X. (Media Indonesia)

2. RI: Penandatanganan Ekstradisi RI-China Tunggu Waktu

Penandatanganan naskah ekstradisi Indonesia-China yang belum terlaksana pada 2008, hanya menunggu waktu yang pas dan diharapkan bisa terlaksana pada 2009, kata perwakilan RI di China.

"Tertundanya penandatanganan naskah ekstradisi kedua negara yang diharapkan dilaksanakan 2008 lebih disebabkan dengan waktu antara masing-masing menteri luar negeri yang kurang pas," kata Wakil Kepala Perwakilan RI untuk China Mohamad Oemar, di Beijing, Rabu (14/1).

Menurut Mohamad Oemar, rancangan perjanjian ekstradisi tersebut sesungguhnya sudah selesai dibahas dan disetujui oleh masing-masing negara, sehingga tinggal ditandatangani oleh para menteri luar negeri.

Secara substansi, katanya, kedua negara juga telah melakukan upaya pro-aktif agar penandatanganan naskah kerjasama itu bisa segera terlaksana, tapi karena kurang pasnya jadwal para menteri luar negeri kedua negara maka hingga kini belum bisa dilakukan.

Dalam kunjungan Presiden Yudhoyono Oktober 2008 ke Beijing ketika menghadiri KTT Asia-Eropa (ASEM), rencananya juga akan ditandatangani naskah ekstradisi tapi karena waktunya yang kurang pas maka tertunda kembali.

Oemar mengatakan, naskah ekstradisi kedua negara itu memang memiliki nilai penting dan strategis bagi Indonesia dan China, sehingga kedua negara memiliki perangkat hukum bagi kepentingan nasional kedua negara.

"Sekali lagi penundaan naskah ekstradisi kedua negara lebih disebabkan oleh kurang pasnya waktu pelaksanaan oleh kedua menteri luar negeri, bukan disebabkan oleh faktor lainnya. Rancangannya sudah siap sejak lama," katanya menegaskan.

Dia mengatakan, satu lagi naskah kerjasama yang belum bisa terlaksana dari rencana pada 2008 adalah Rencana Aksi Kerjasama Strategis yang sampai kini juga tertunda karena masalah kecocokan waktu para petinggi kedua negara.

Rancangan rencana aksi yang disampaikan oleh Indonesia telah mendapat tanggapan dari pemerintah China sehingga sudah siap untuk ditandatangani oleh pejabat setingkat Wakil PM China dengan Menkopolkam.

Dalam kunjungan resmi Wakil PM Li Keqiang ke Indonesia tanggal 20-23 Desember 2008, kata Oemar, rencana aksi tersebut juga belum bisa ditandatangani mengingat singkatnya waktu kunjungan di samping fokus kunjungannya adalah untuk kerjasama energi dan ekonomi.

Oemar mengatakan sekalipun Rencana Aksi Kerjasama Strategis kedua negara sampai kini belum bisa ditandatangani tapi kerjasama di berbagai bidang tetap berjalan positif dan sesuai dengan yang direncanakan

"Paling menonjol adalah hubungan perdagangan kedua negara yang belakangan menunjukkan kecenderungan meningkat yang sudah bisa mencapai 28 miliar dolar AS," katanya.

Selain itu juga kunjungan pejabat tinggi dua arah telah berjalan dengan baik, antara lain ketika Presiden Yudhoyono bertemu dengan Presiden Hu Jintao pada Oktober 2008 dan kunjungan Wakil PM Li Keqiang ke Indonesia pada Desember 2008. (Jurnal Nasional)

3. Kerjasama Pendidikan RI-Rusia Ditandatangani

MoU kerjasama dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan antarnegara telah ditandatangani oleh Universitas Indonesia (UI) dan St Petersburg State Polytechnical University of Russia di ruang rapat A Lantai 2 Gedung PAU UI, Depok, kemarin. "Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya berbagai program kerjasama pendidikan. Seperti: pertukaran pelajar, pengembangan riset, program penelitian bersama dan peningkatan kapasitas pendidikan sains dan teknologi UI," demikian siaran pers Universitas Indonesia yang dikirimkan kepada Jurnal Nasional, kemarin.

Rusia sejak lama dikenal sebagai negara "produsen" intelektual dunia. Banyak lahir para pemenang Hadiah Nobel dari Negara Beruang Putih ini. St Petersburg State Polytechnical University of Russia yang berdiri sejak 1899 dengan tradisi akademik yang kuat merupakan tanah asal para ilmuwan terbaik dunia.

Misalnya: DI Mendeleyev, yang mengukir sejarah dunia dengan menyusun unsur-unsur kimia berdasarkan massa molekul relatif dalam bentuk tabel unsur yang mirip dengan yang kita jumpai saat ini. Dalam susunan tersebut Mendeleyev mampu menyuguhkan keteraturan yang kita kenal dengan teori oktet di mana sifat-sifat kimia suatu unsur berulang setiap delapan unsur.

Tentu, tak hanya Mendeleyev. Nama Stephen P Timoshenko pun tidak asing bagi mahasiswa teknik di Indonesia. Salah seorang guru besar di St Petersburg Polytechnic University di awal 1900-an ini dikenal lewat buku dan kontribusinya pada ilmu kekuatan bahan.

Para peraih Nobel: NN Semyonov (Nobel Kimia, 1956), PL Kapitsa (Nobel Fisika, 1978), dan Zh I Alferov (Nobel Fisika, 2000) juga sederet akademisi yang mengabdikan diri mereka di St Petersburg State Polytechnical University of Russia. Karya-karya mereka bermanfaat bagi umat manusia. (Jurnal Nasional)

4. Hillary Clinton recognizes Indonesia's economic role

Senator Hillary Rodham Clinton in her statement when testifying as secretary of state nominee at the US Senate's Foreign Relations Committee in Washington DC, last Tuesday (Jan. 13), recognized Indonesia's role in dealing with the global economic crisis.

"We know that emerging markets like China, India, Brazil, South Africa, and Indonesia are feeling the effects of the current crisis. We all stand to benefit in both the short and long term if they are part of the solution, and become partners in maintaining global economic stability," she said.

"For too long, we have merely talked about the need to engage emerging powers in global economic governance; the time to take action is upon us. The recent G-20 meeting was a first step, but developing patterns of sustained engagement will take hard work and careful negotiation," she added.

Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono attended the G-20 Summit on the global economic crisis which was held in Washington DC, last November 2008.

In her statement Hillary Clinton also recalled President-elect Obama's mother, Ann Dunham, who had worked in Indonesia from late 1960s until early 1990s. Clinton called Ann Dunham as a pioneer in micro finance in Indonesia.

"As a personal aside, I want to mention that President-elect Obama's mother, Ann Dunham, was a pioneer in micro finance in Indonesia. In my own work on micro finance around the world - from Bangladesh to Chile to Vietnam to South Africa and many other countries - I've seen firsthand how small loans given to poor women to start small businesses can raise standards of living and transform local economies," she said.

"President-elect Obama's mother had planned to attend a micro finance forum at the Beijing women's conference in 1995 that I participated in. Unfortunately, she was very ill and couldn't travel and sadly passed away a few months later. But I think it's fair to say that her work in international development, the care and concern she showed for women and for poor people around the world, mattered greatly to her son, and certainly has informed his views and his vision. We will be honored to carry on Ann Dunham's work in the months and years ahead," she said.

The Senate is expected to confirm Hillary Clinton as the new US Secretary of State after the presidential inauguration of Barack Obama on January 20, 2009. (Antara)

I | | .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Usulan Perubahan UUD Perlu Dibawa ke Publik

Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, usulan amendemen UUD harus dibawa terlebih dahulu ke arena publik yang luas. Sebab, Indonesia tidak mengenal sistem referendum atau plebisit. Presiden Yudhoyono mengatakan hal itu dalam Hari Ulang Tahun Legiun Veteran RI (LVRI) Ke-52 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/1), merespons keprihatinan LVRI terhadap hasil perubahan UUD 1945.

Presiden mengatakan, kalau ada pemikiran baru menyangkut konstruksi atau substansi, hal itu lazimnya dikembalikan kepada yang memberi mandat, yaitu rakyat. Ini bisa dilakukan dengan model referendum atau plebisit, tapi ini tak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Saya terus berkomunikasi dengan banyak pihak menyangkut UUD, saya mendengar semua karena itu adalah kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi kita. Oleh karena itu, ruang dan peluang selalu ada dalam melakukan perubahan UUD, tinggal menyangkut substansi apa, mengapa dilakukan, dan bagaimana pikiran rakyat terhadap perubahan itu. Itulah dasar urgensi dilakukannya perubahan UUD," papar Presiden.

Sebelumnya, Ketua Umum Legiun Veteran RI Letjen (Purn) Rais Abin menyatakan prihatin karena UUD 1945 sudah “diacak-acak” atau diamendemen hingga empat kali. Ini mengakibatkan, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tetapi tidak diberkahi Kabinet Presidensial, melainkan Kabinet Parlemerter, yang tidak akan seefektif Kabinet Presidensial. Dengan demikian perencanaan tepat akan makin jauh dan sulit mengatur pembangunan berencana.

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selama ini ada pemikiran kalau ada yang menentang pemerintah, termasuk Presiden, yang bersangkutan akan dinilai berani, sekalipun kebijakan itu tepat dan logis. Ada juga yang berterima kasih, memberikan penghargaan atau pujian kepada pemerintah pusat dan daerah, sekalipun program-program itu benar, tapi hal ini dianggap tabu dan malahan dosa.

“Tapi tidak semua (berpikiran seperti itu). Saya yakin rakyat kita punya hati, bisa merasakan secara jujur dan jernih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sudah dicapai pemerintah atau yang belum,” kata Presiden.

Untuk itu, kata Presiden, lima tahun ini dirinya selalu mendorong untuk mengembangkan budaya berterima kasih dan apresiasi. “Di sisi lain kami memberi teguran, sanksi, bahkan hukum atau sanksi administrasi bagi mereka yang lalai. Harus begitu. Kalau reward and punishment (imbalan dan sanksi) dijalankan dengan benar maka kehidupan akan menjadi adil,” tegasnya. (Sinar Harapan)

2. MPR: Segera Keluarkan Israel dari PBB

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mendesak Majelis Umum PBB segera mengeluarkan Israel dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terkait sikap Israel yang tidak mengindahkan seruan dan tekanan masyarakat internasional.

Demikian pernyataan Ketua MPR Hidayat Nurwahid usai Rapat Pimpinan (Rapim) MPR di Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan Jakarta, Kamis (15/1) siang.

Nurwahid menyatakan, Indonesia harus terus-menerus melancarkan tindakan mendorong terciptanya perdamaian di Kawasan Timur Tengah. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina harus segera diakhiri.

Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, maka Indonesia harus menentang pendudukan itu.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan", kata Nurwahid mengutip Pembukaan UUD 1945.

Atas dasar itu, Pimpinan MPR mengecam dan mengutuk keras kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang merupakan kelanjutan dari penjajahan terhadap israel.

MPR menyatakan belasungkawa atas jatuhnya korban pada masyarakat sipil, seperti orang tua dan anak-anak serangan Israel telah menghancurkan berbagai fasilitas.

"Di saat pejuang Palestina di Gaza sedang mempertahankan Tanah Airnya dari agresi kolonialis Israel, Presiden Mahmoud Abbas hendaknya berada di garis terdepan untuk menyatukan rakyat Palestina guna menyelamatkan Gaza dan penjajahan dan genocide(pembunuhan massal, red) Israel," katanya.

MPR mendesak PBB untuk segera menyelenggarakan Sidang Umum untuk menghentikan serangan Israel atas Gaza. Israel harus segera menarik mundur pasukannya serta mengakhiri blokade Israel atas Gaza agar segera terwujud perdamaian.

"Apabila Israel tetap membangkang atas keputusan Sidang Umum PBB, agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan PBB," katanya. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI :

1. 15 Januari Harga BBM Turun Lagi

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pada 15 Januari pemerintah akan menurunkan lagi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri, namun tidak disebutkan berapa besaran penurunannya.

"Insya Allah, 15 Januari akan turun. Tentu pemerintah akan berusaha mengurangi beban masyarakat sesuai dengan harga minyak dunia," kata Wapres Jusuf Kalla saat keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/1).

Ketika ditanyakan berapa nilai penurunan harga tersebut, Wapres mengelak dan meminta masyarakat menunggu saja. Wapres menjelaskan penentuan harga BBM dipengaruhi oleh tiga hal yakni harga minyak mentah dunia, besaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan berapa subsidi yang disediakan dalam APBN. "Boleh saja harga minyak dunia sama-sama 50 dolar AS per barel. Namun ketika nilai tukar rupiah tak sama maka akan berbeda pula hitungannya," kata Wapres.

Wapres memberikan contoh meski harga minyak dunia sama 50 dolar per barel namun ketika nilai tukar rupiah Rp9.500 per dolar, maka itu berarti 50 X Rp 9.500. Namun ditambahnya saat nilai tukar rupiah dikisaran Rp11.000 seperti saat ini, maka itu berarti 50 X Rp11.000. "Tapi pasti turun (harga)," kata Wapres. Namun Wapres tetap tidak bersedia menyebutkan berapa penurunan harga yang akan dilakukan pemerintah.

Sementara mengenai kelangkaan BBM beberapa waktu lalu, Wapres mengatakan hal itu terjadi karena perubahan sistem pembayaran melalui bank dan berbarengan pula dengan libur panjang. "Kedua, akibat pertumbuhan ekonomi enam persen tahun lalu, pertumbuhan kendaraan mobil dan motor pesat sekali. Penjualan mobil 550 ribu per tahun dan enam juta motor. Bayangkan itu perlu bensin semua," kata Wapres.

Karena itu, tambah Jusuf Kalla, akan wajar kalau terjadi antrian yang agak panjang di SPBU akibat terlalu banyaknya kendaraan. Wapres juga menjelaskan saat ini ada sekitar 4.500 SPBU di Indonesia sehingga kadang-kadang terjadi masalah dalam transportasi dan sebagainya. "Yang jelas saya sudah cek stok cukup untuk 22 hari. Jadi ngak ada masalah. Karena itu cepet bisa diatasi," kata Wapres. (Media Indonesia)

C. SOSBUD :

1. Guruh Gunakan Musik sebagai Alat Perjuangan

Senyum mengembang dari seniman Guruh Soekarno Putra Ucapan selamat ulang tahun mengalir dari keluarga, kerabat, kawan dekat dan sejumlah tokoh. Putra proklamator Bung Karno yang memiliki nama asli Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra, Selasa (13/1) malam, menggelar perayaan Ulang Tahun ke-56 di kediamannya, Jalan Sriwijaya Raya Nomor 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Diantara tokoh yang hadir mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Oemar Dhani, mantan Menteri Koperasi era 1960-an Achadi, bos Media Group Surya Paloh, dan pelawak sekaligus calon anggota legislatif Miing Bagito.

Sebenarnya, kata Guruh, ia tidak menginginkan perhelatan ulang tahun, tapi karena sudah menjadi tradisi dari teman-teman dan keluarga, akhirnya ia menggunakan kesempatan itu untuk kumpul-kumpul.

Rupanya, malam itu, selain ajang kumpul-kumpul, Guruh yang juga Ketua Gerakan Spirit Pancasila ini, memperkenalkan band yang ia bentuk bergenre rock, 'Kaca Benggala'. "Musik bagi saya alat perjuangan. Kami mengajak seluruh bangsa tergugah melihat Indonesia yang keadaannya semakin memprihatinkan", ujarnya.

Ketika ditanya mengenai makna ultah kali ini, Guruh mengatakan ulang tahun itu merupakan hal biasa, karena itu pasti dirayakan tiap tahun. Tapi ia merasa ultah kali ini untuk merenung apa saja yang sudah diperbuat selama hidup. Dan di usia yang sudah tidak muda tersebut, ia hanya ingin lebih mengabdikan kepada Tuhan dan Negara.

Bagaimana persiapan nyaleg? Caleg Partai PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Timur ini (Surabaya dan Sidoarjo) mengatakan sampai hari ini, tidak melakukan apa-apa karena jadi caleg tidak terlalu penting. Tetapi yang lebih penting adalah, apa yang sudah kita perbuat untuk bangsa ini. (Media Indonesia)

D. HANKAM :

1. UNIFIL Tingkatkan Kewaspadaan

Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) makin meningkatkan kewaspadaannya, termasuk menyiapkan sejumlah tempat perlindungan (shelter) bagi warga sipil dan militer UNIFIL, menyusul situasi keamanan yang memanas di Jalur Gaza.

Kesiapan tempat perlindungan, baik yang berada di sekitar Markas Besar UNIFIL maupun di masing-masing kamp kontingen beberapa negara yang tergabung dalam UNIFIL, ditinjau secara mendadak oleh Wakil Komandan UNIFIL Brigjen Apurba Kumar Bardalai.

Perwira Penerangan Kontingen Garuda (Konga) XXVI-A Kapten Laut (KH) Hondor Saragih, Rabu (14/1) menyebutkan markas Besar UNIFIL mempunyai 64 tempat perlindungan yang digunakan untuk menampung 2.200 orang. Setiap shelter dapat menampung 14 sampai 300 personel UNIFIL, baik sipil maupun militer yang berasal dari berbagai negara.

Setiap shelter dilengkapi persediaan siap makan dan air dalam botol untuk tiga hari per orang serta kelengkapan lainnya guna menunjang kehidupan dalam kondisi darurat, seperti P3K, komunikasi telepon, dan wc darurat. Pengaturan alokasi personel untuk masing-masing shelter ditentukan Force Protection Center (FPC) sesuai jarak letak kantor dengan shelter serta kapasitas shelter tersebut, sementara Departemen Logistik bertugas melengkapi kebutuhan seluruh shelter.

Penempatan personel itu tidak saja pada saat jam kerja, juga pada saat di luar jam kerja, ataupun sedang dalam perjalanan. Selain kesiapan shelter, pihak UNIFIL juga merevisi prosedur tetap keadaan gawat darurat baik di lingkungan kantor, akomodasi tempat tinggal maupun dalam perjalanan, yang harus diketahui seluruh staf di Markas Besar UNIFIL.

Konflik di Jalur Gaza dapat memicu aktivitas balas dendam terhadap Israel yang dilakukan pengungsi Palestina dan juga pendukung Hamas di Lebanon. Pada pekan lalu tiga roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam Israel utara dan mengakibatkan dua orang luka ringan. Roket-roket itu adalah yang pertama ditembakkan dari Lebanon sejak tahun 2007, dan terjadi pada hari ke-13 serangan negara Yahudi itu di Jalur Gaza. Tidak segera jelas siapa yang menembakkan roket-roket itu. (Media Indonesia)

E. HUKUM :

1. Hari Ini Hakim Agung Pilih Ketua MA

Sebanyak 43 hakim agung, hari ini, Kamis (15/1), akan memilih ketua Mahkamah Agung (MA) dan wakil ketua MA yang baru.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Joko Sarwoko di Jakarta, Rabu. Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nurhadi, mengatakan, pemilihan Ketua MA dan Wakil Ketua MA yang baru akan diikuti oleh 43 hakim agung.

Nurhadi mengatakan, sesuai tata tertib (Tatib) pemilihan ketua MA dan wakil ketua MA, masing-masing hakim agung akan memilih satu calon ketua MA. Namun seorang hakim agung bisa dicalonkan menjadi ketua MA apabila yang bersangkutan memperoleh dukungan lima suara.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 4 tata tertib pemilihan yang menyebutkan setiap hakim agung yang dapat dicalonkan sebagai ketua MA atau wakil ketua MA harus memperoleh minimal lima suara pada putaran pertama. "Bila tidak memperoleh lima suara itu, maka pemilihan diulang kembali," katanya.

Ia menambahkan jika seorang hakim agung sudah diperoleh minimal lima suara dari setiap calon, maka akan kepada yang bersangkutan akan ditanyakan kesediaannya untuk maju ke putaran kedua pemilihan ketua MA.

Lebih lanjut disebutkan, dalam pemilihan ketua MA tersebut jika seorang calon pada putaran pertama telah memperoleh lebih dari 50 persen suara, maka secara otomatis langsung menjadi ketua MA. "Hal serupa dilakukan juga dalam pemilihan wakil ketua MA," katanya.

Nurhadi mengatakan, pemilihan ketua dan wakil ketua MA akan dipimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dan pemilihan dapat dikatakan sah jika dihadiri oleh 2/3 dari 43 hakim agung.

Sebaliknya, lanjut Nurhadi, kalau tidak terpenuhi 2/3, maka sidang ditunda satu jam, dan jika tetap tidak terpenuhi maka pemilihan ditunda paling lama tujuh hari. "Dalam pemilihan itu, setiap hakim agung akan mendapatkan dua kertas blanko, yakni warna merah untuk ketua MA dan merah jambu untuk wakil ketua MA," katanya.

Juru bicara Mahkamah Agung Joko Sarwoko mengatakan, pemilihan ketua MA dilakukan secara terbuka. Pemilihan akan dihadiri mantan ketua dan mantan wakil ketua MA, mantan hakim agung, Ketua pengadilan Tinggi DKI dan ketua pengadilan negeri di DKI Jakarta.

Pemilihan ketua MA dan wakil ketua MA untuk menggantikan Bagir Manan dan Mariana Sutadi yang sudah pensiun beberapa waktu lalu. Namun dalam pemilihan hari ini, bisa terjadi pemilihan untuk dua wakil ketua MA. Hal ini terjadi jika Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial Harifin Tumpa terpilih menjadi ketua MA, sehingga akan dilakukan pemilihan wakil ketua MA untuk menggantikan Harifin Tumpa.

Sementara itu, Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho minta agar pemilihan ketua MA ditunda karena ICW akan mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita mendesak mereka untuk menunda pemilihan sebelum uji formil diajukan. Hal ini kami lakukan, terkait masalah Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) yang akan diajukan. Pekan depan kita akan ajukan uji materiil terkait UU Mahkamah Agung ke MK," katanya.

Jika uji materiil diterima MK, kata Emerson, maka dengan sendirinya hakim-hakim yang akan terpilih jadi pimpinan MA yang berusia 67 tahun ke atas, harus berhenti sebagai hakim agung dan Ketua MA.

Selain itu, jika MK menerima pengajuan uji materiil ICW, kata dia, maka pihaknya tidak akan mengakui legitimasi Ketua MA terpilih jika pemilihan berlangsung hari ini.

Peneliti hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring peradilan ICW Illian Deta Artasari mengatakan bahwa calon Ketua MA haruslah hakim agung yang berkomitmen dengan pemberantasan korupsi dan tidak pernah memvonis bebas kasus korupsi. (Suara Karya)

2. Depkumham Selidiki Kaburnya Tahanan Imigrasi NTT

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) menyelidiki penyebab kaburnya 18 tahanan rumah detensi imigrasi (rudenim) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dirjen Imigrasi Basyir Barmawi di Jakarta, Kamis (15/1) mengatakan upaya penyelidikan itu dilakukan untuk mencari kebenaran dibalik peristiwa itu.

"Imigrasi sudah bekerjasama dengan Polri," kata Basyir.

Basyir mengatakan, penyelidikan juga untuk membuktikan berbagai kecurigaan tentang peristiwa kaburnya para imigran tersebut.

Basyir mengatakan, kedelapan belas imigran yang melarikan diri itu terdiri dari 12 warga negara Afganistan, lima warga negara Myanmar, dan seorang warga negara Pakistan.

Mereka melarikan diri pada 14 Januari 2009 pukul 01.30 WIT. Menurut Basyir, para imigran tersebut sempat menganiaya petugas rudenim sebelum melarikan diri.

Setelah menerima laporan dari petugas, pihak imigrasi menurunkan sejumlah petugas dari pusat. "13 orang sudah ditangkap di perairan sekitar NTT," kata Basyir. Menurut Basyir, tiga orang dari ketiga belas imigran itu ditemukan telah meninggal dunia. (Jurnal Nasional)

3. KPK Selidiki Aliran Dana Bapertarum

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri (Bapertarum). Hal itu dilakukan karena masih banyak pegawai negeri sipil yang sulit mendapatkan haknya. KPK pun menyasar larinya uang iuran dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipotong tiap bulannya untuk Bapertarum.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Haryono Umar ketika dihubungi, Selasa (13/1). "Setiap bulan PNS dipotong iuran Bapertarum, tapi untuk mendapatkan rumah masih sulit," terangnya.

Sementara itu, setiap tahun dana yang dihimpun Bapertarum terus bertambah. Oleh karena itu, badan itu diselidiki oleh KPK. Fakta tersebut, menurut Haryono, berujung kesimpulan sementara dari KPK bahwa tujuan diadakannya Bapertarum tidak sesuai fungsi sesungguhnya.

Sehari sebelumnya, di Kantor DPP Golkar, Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan pihaknya menyelidiki Bapertarum. Dia berkata, selama puluhan tahun menjadi PNS, dirinya tak pernah tahu dana yang terkumpul di Bapertarum. "Bahkan, sejak berdiri, saya sulit mendapat bantuan untuk memiliki rumah dari Bapertarum," urainya. Dia mengatakan lagi, "Jika ada indikasi korupsi, kami akan sikat!"

Bapertarum didirikan berdasarkan Keppres No 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap bulan PNS, mulai dari golongan I-IV, dipotong dengan besaran berbeda untuk Bapertarum.

Berdasarkan laporan akhir tahun 2007 yang didapat dari website Bapertarum, dijelaskan total dana terkumpul sejak 1993-2007 mencapai Rp 6,461 triliun. Dana yang tersalur Rp 2,424 triliun untuk 1.870.519 PNS sehingga saldo pada akhir 2007 mencapai Rp 4,188 triliun. (Sinar Harapan)

4. DPR Janji Tak Ulur-ulur RUU Tipikor

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berupaya meyakinkan publik bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) akan selesai sesuai tenggat waktu.

Ketua DPR Agung Laksono menjanjikan, RUU Tipikor segera selesai sebelum masa bakti anggota DPR periode 2004-2009 selesai, atau sebelum 1 Oktober 2009. Namun, tenggatnya tak bisa dipaksakan sebelum Pemilu 2009 mendatang.

"Selambat-lambatnya, Desember mungkin sudah harus selesai. Tapi berkaitan dengan aturan internal, seluruh perundang-undangan itu sudah harus selesai sebelum berakhir masa bakti kami per 1 Oktober. Waktunya mungkin tidak dapat dipaksakan sebelum pemilu, tapi pada masa bakti ini diharapkan UU Tipikor sudah selesai," janji Agung di DPR, Selasa (13/1).

Ia kembali membantah, ada agenda DPR untuk memperlama pembahasan RUU itu. Menurutnya, yang dilakukan kini adalah upaya untuk membahas secara komprehensif.

Optimisme yang sama sebelumnya diungkapkan pula oleh pimpinan panitia khusus (pansus) RUU ini yang juga anggota Komisi III DPR Dewi Asmara.

Terhadap RUU ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat tetap mempertahankan komposisi majelis hakim Tipikor seperti sekarang. Sikap ini akan dijelaskan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pekan depan. Agenda RDP, kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, memang membahas RUU Pengadilan Tipikor.

Dia melanjutkan, komposisi hakim Pengadilan Tipikor diatur dalam Pasal 27 RUU ini yang kini dibahas panitia khusus di DPR RI. Pada pasal itu, komposisi hakim ad hoc ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. "KPK menilai rawan intervensi," tegas Haryono. (ant/rikando somba) (Sinar Harapan)

5. Sisminbakum Kembali Dijalankan

Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) Andi Mattalatta menyatakan pihaknya terbuka bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut adanya dugaan korupsi atas keberadaan 66 rekening liar sebagaimana dilaporkan Departemen Keuangan (Depkeu).

Dephukham merincikan, di antara yang disebut rekening liar itu adalah rekening yang menyimpan dana transfer Tommy Soeharto di Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas dan rekening milik mantan buronan koruptor Hendra Rahardja.

"Kalau dia menemukan pelanggaran, silakan. Departemen kami sangat terbuka, termasuk saya. Kalau Anda menemukan saya menerima uang haram, tulis saja," kata Andi usai menghadiri seminar sehari tentang kinerja penegak hukum yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Selasa (13/1).

Dijelaskan Andi, rekening yang menyangkut dana Hendra Rahardja sudah diputus, beberapa miliar untuk tim penggabungan, sedangkan Rp 4 miliar sudah diserahkan ke tim likuidasi. Sisanya Rp 5 juta, sudah diputus Desember 2008.

Adapun sisanya sebanyak 60 rekening, merupakan rekening milik balai harta peninggalan. Di Indonesia, menurut Andi, terdapat lima balai harta peninggalan. Masing-masing balai memiliki lebih dari satu rekening yang didepositokan. Terkait hal ini, Andi mengatakan sudah meminta izin Departemen Keuangan untuk mengkonsolidasikan rekening-rekening balai harta peninggalan.

"Sudah diizinkan Departemen Keuangan dan saya sudah sampaikan kepada masing-masing balai harta peninggalan agar hanya memiliki dua rekening," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Depkeu beberapa waktu lalu telah melaporkan adanya 260 rekening liar senilai Rp 314,2 miliar dan US\$ 1,1 juta kepada KPK. Ratusan rekening itu tersebar di Mahkamah Agung. Lainnya, tersebar di berbagai departemen. (Sinar Harapan)

6. Jampidsus Nilai Peraturan Menteri Langgar Hukum

Jakarta-Pelayanan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) beroperasi kembali secara online, Senin (12/1). Alat yang digunakan sebagian masih alat lama yang merupakan milik PT Sarana Rekatama Dinamika rekanan Ditjen Administrasi Hukum Umum pada Departemen Hukum dan HAM. Uniknya, Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap menilai biaya administrasi Sisminbakum adalah pungutan liar walaupun dipayungi peraturan menteri.

"Lebih dari 8.000 notaris mengakses Sisminbakum sejak awal pekan ini. Kami hanya dititipkan alat SRD oleh Kejaksaan untuk dikelola. Tapi, kami tak mau ikut berpolemik," kata Ketua Tim Restrukturisasi Sisminbakum Freddy Haris ketika dihubungi SH, Senin.

Dia menambahkan, untuk program, pihaknya membangun baru dengan dana yang tidak diketahui asalnya oleh tim restrukturisasi. Freddy menyebutkan, server untuk sistem itu menggunakan server Dephukham.

Menurutnya, apa yang dilakukan tim adalah untuk pelayanan pada masyarakat. "Tidak benar jika objek vital dioperasikan swasta secara penuh," tutur Freddy. Sebaliknya, pengacara SRD Hotma Sitompoel menanggapi, secara hukum tidak dibenarkan menggunakan barang dalam keadaan disita. Pekerjaan dalam kontrak, lanjutnya, juga tidak boleh diputuskan sepihak.

Menurut Hotma, semua yang terlibat dalam kasus ini orang-orang yang mengerti hukum. Jadi, jangan mengeluarkan pernyataan memalukan. "Karena pemerhatinya bukan hanya orang awam, tapi dosen-dosen, ahli-ahli hukum," terang Hotma.

Di kesempatan berbeda, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy menegaskan bahwa biaya administrasi badan hukum atau sisminbakum

adalah pungutan liar. Walaupun dipayungi peraturan menteri, Marwan menilainya bertentangan dengan aturan yang di atasnya.

"Dari dulu saya sudah mengatakan, ini tidak ada urusannya dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-red)," tukas Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy kepada wartawan, Selasa (13/1).

Ia menandaskan, pihaknya sudah menyusun dakwaan untuk tiga tersangka, yakni mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Mereka adalah Syamsudin Manan Sinaga, Zulkarnaen Yunus, dan Romli Atmasasmita. "Apakah proyek ini merugikan negara atau masyarakat, itu urusan nanti," pungkasnya. (Sinar Harapan)

F. OLAH RAGA :

1. Simon Perpanjang Rekor Kemenangan

Pebulutangkis tunggal putra peringkat 14 dunia, Simon Santoso, memperpanjang rekor kemenangannya atas pemain Malaysia, Kuan Beng Hong, menjadi 3-1 saat meraih kemenangan pada putaran pertama Korea Terbuka Super Series.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Olympic Gymnasium, Seoul, Rabu, Simon mengalahkan pebulutangkis Malaysia berperingkat 60 dunia itu dengan kemenangan 21-12 dan 21-16. "Simon mainnya bagus," ujar pelatih tunggal putra Hendrawan yang mendampingi Simon dalam pertarungan selama 26 menit tersebut.

Dua kemenangan Simon sebelumnya atas Beng Hong diraih saat keduanya bertemu di Thailand Terbuka 2004 dan All England 2007, sedangkan pemain Malaysia itu unggul dalam pertemuan di Malaysia Terbuka 2003.

Selanjutnya, juara Taiwan Terbuka dan runner-up Singapura dan Indonesia Super Series yang semuanya tahun lalu itu akan memperebutkan tempat di babak delapan besar dengan pemain junior Malaysia, Chong Wei Feng.

"Saya belum pernah bertemu dia. Doakan saja biar berhasil," kata Simon usai pertandingan mengenai calon lawannya tersebut.

"Apa pun bisa terjadi. Yang penting, kalau mainnya normal, dia bisa menang," ujar Hendrawan.

Sementara itu, pemain asal Klub Djarum Kudus, Andre Kurniawan, bangkit dari ketertinggalan game pertama untuk maju ke putaran berikutnya dengan mengalahkan pemain Jepang, Kenichi Tago. Andre kehilangan game pertama 14-21, namun berhasil menyamakan kedudukan dengan merebut game kedua, 21-18.

Pada game penentuan, meski telah memimpin 20-14, Andre tidak dengan mudah menutup pertandingan saat Tago sempat memperpendek jarak dengan membukukan empat angka berturut-turut, sebelum Andre menyudahinya pada kedudukan 21-18.

Pada babak 16 besar, Andre akan menghadapi pebulutangkis Malaysia, Mohamad Arif Abdul Latif, yang menang atas Anand Pawar dari India, 21-14 dan 21-15. Arif adalah pemain yang mendapat promosi dari babak kualifikasi setelah Sony Dwi Kuncoro batal tampil di turnamen berhadiah total 300.000 dolar AS itu.

Sementara itu, pebulutangkis putri peringkat 37 dunia, Pia Zebadiah, mengawali turnamen Korea Terbuka Super Series dengan kemenangan untuk membukukan tempat di putaran kedua dan bertemu unggulan kedua dari Denmark, Tine Rasmussen. Dalam pertandingan putaran pertama di Olympic Gymnasium, Seoul, Pia berhasil mengatasi pemain Malaysia, Lydia Cheah, dalam dua game langsung, 21-9 dan 21-16, untuk maju ke babak 16 besar.

Dengan kemenangan tersebut, Pia maju ke babak berikutnya untuk bertemu peringkat kedua dunia, Tine, yang pekan lalu berhasil mempertahankan gelarnya di Malaysia Super Series, untuk pertama kalinya sepanjang karier.

"Belum pernah bertemu (dengan Tine), tetapi saya siap saja. Yang penting doa dan usaha dulu," kata Pia mengenai pertandingan perebutan tempat di perempatfinal yang akan digelar pada Kamis. (Suara Karya)

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. RI's emissions have decreased

The government reported a significant decrease in the country's greenhouse gas emissions that could be used to counter a series of international reports ranking Indonesia as the world's third largest polluter.

A draft of the second national communication report showed that the country's total emissions between 2000 and 2006 stood at 638,975 giga tons of carbon dioxide equivalents (CO₂e) per year, compared to 952,200 giga tons CO₂e in 1994.

"But, we are still calculating emissions from peat land before launching the report, slated for March," Masnellyarti Hilman, deputy director for nature conservation enhancement and environment degradation control at the ministry told The Jakarta Post on Wednesday.

She said that the forestry and energy sectors were still the main contributors to the country's emissions, accounting for 72 percent of the total.

The draft said that emissions from solid waste contributed 16 percent, while the agriculture and industrial sectors accounted for eight and four percent respectively.

Indonesia conducted its last inventory of greenhouse gas emissions in 1994 and submitted that report to the United Nation's Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1999.

The UN requires rich countries, that are signatories of the Kyoto Protocol, to submit data on emissions every year.

Submitting a national report is voluntary for developing countries, including Indonesia.

The inventory is necessary for the country to formulate its action plan to mitigate and adapt to climate change.

The British Department for International Development and Consultancy earlier said that Indonesia had become the world's third largest emitter because of rapid deforestation.

The world's largest emitter, the United States, releases 6,005 million tons of carbon dioxide equivalents (MtCO₂e) annually, followed by China with 5,017 mtCO₂e. The majority of the emissions in both countries come from the energy sector.

Indonesia's yearly emissions are estimated to be 3,014 MtCO₂, mostly from land conversion and forest destruction, which contributed to about 2,563 MtCO₂e of the total. (The Jakarta Post)

III. ARTIKEL

:

1. Australia Puji Demokrasi di Indonesia

Australia memuji proses demokrasi di Indonesia yang dinilai telah berjalan dengan baik dan membawa terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Demikian disampaikan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto di Jakarta, kemarin.

Pertemuannya ini dalam rangka membicarakan seputar perkembangan demokrasi di Indonesia.

Farmer mengatakan bahwa pertemuannya dengan Wiranto itu hanya membicarakan seputar perkembangan demokrasi di Indonesia. "Kita mendukung bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan terciptanya good governance di Indonesia," ujarnya.

Soal bagaimana hasil dari proses demokrasi tersebut dan siapa yang akan terpilih nanti, ujarnya, terserah pada rakyat Indonesia sendiri.

Sebagai negara yang bertetangga, kata Farmer lagi, Australia berkepentingan untuk membina hubungan yang baik dan konstruktif dengan Indonesia siapapun yang nantinya memegang pemerintahan.

Ditanya apakah dalam pertemuan itu dibahas pula soal Timor Timur, Farmer mengatakan, "Kami tidak membicarakan masalah itu".

Mengenai pertemuannya dengan Bill Farmer, Wiranto menjelaskan bahwa mereka memperbincangkan soal bagaimana demokrasi itu harus bergulir di Indonesia.

"Memang harus ada penyesuaian dengan demokrasi yang sedang dibangun dan berjalan kencang saat ini dengan budaya masyarakat Indonesia yang sedikit tertinggal di belakangnya," ujarnya.

Sukmawati Jadi Capres

Di tempat terpisah, Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarnoputri menyatakan siap maju sebagai cawapres mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Hal itu disampaikannya saat mendatangi kediaman pribadi Sri Sultan HB X di Jakarta, kemarin. Bersama sejumlah pengurus DPP PNI, Sukmawati dan Sri Sultan sempat melakukan pembicaraan sekitar satu jam.

Sukmawati mengatakan, dirinya siap mendampingi Sultan HB X karena Sultan merupakan figur yang paling pas untuk memimpin Indonesia ke depan.

Menanggapi pernyataan Sukmawati tersebut, Sri Sultan menyatakan adanya dukungan dari berbagai pihak, membuat dirinya bulat maju sebagai capres.

Namun, soal dengan siapa akan berpasangan, Sultan belum bisa memastikannya. "Belum bisa dikatakan sekarang, ini butuh waktu dan proses," tuturnya.

Sultan berjanji, jika terpilih masalah pendidikan menjadi salah satu prioritas yang harus segera diperbaiki. Menurut dia, hingga saat ini pendidikan di Indonesia masih jauh dari cita-cita Ki Hajar Dewantara.

Sultan menegaskan, dalam bidang pendidikan tidak ada warga minoritas dan mayoritas karena semuanya itu warga negara. "Tegas saja kita. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas, semua adalah warga negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua III Dewan Harian Nasional (DHN) Angkatan 45 Tyasno Sudarto mengingatkan, para capres diharapkan mampu dan berani mengembalikan alur kebudayaan sesuai kepribadian bangsa, yang tersurat dalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli.

"Pengembalian alur kebudayaan tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kebudayaan sendiri, jati diri, falsafah dan dasar negara Pancasila," katanya. (Suara Karya)

IV.	LAIN-LAIN	:	T	i	d	a	k
Ada							
V.	EDITORIAL	:					

1. Pengawasan Partai Politik Pengawasan Partai Politik

SEPERTI diperkirakan sebelumnya, bulan-bulan awal 2009 suhu politik Tanah Air mulai menghangat atau bahkan sudah memanas.

Ini klop dengan sebutan 2009 sebagai tahun politik karena pada tahun inilah pesta demokrasi akan digelar. Pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, dan DPD) akan dilakukan pada 9 April, sedangkan pemilihan presiden yang menjadi gong "pesta rakyat" ini dijadwalkan pada bulan Juli.

Seperti halnya pemilu yang sudah-sudah, menjelang hari pencoblosan kejadian-kejadian mengejutkan yang cenderung memanas suhu politik akan terjadi. Manuver-manuver yang dilakukan partai politik (parpol), tokoh-tokoh parpol, para pejabat maupun berbagai pihak dengan maksud dan tujuan memperjuangkan kepentingan politik adalah hal yang tidak bisa dimungkiri.

Manuver politik bisa terwujud dalam berbagai bentuk dan kemasan, mulai yang terang-terangan atau vulgar, yang biasa-biasa saja, yang tidak kentara sampai manuver yang terselubung. Yang terakhir maksudnya manuver tidak vulgar atau cenderung simpatik, tapi cukup intensif memasukkan visi misi politik sehingga memengaruhi masyarakat untuk memberi dukungan saat pemilu nanti.

Berbagai bentuk manuver politik atau kampanye tersebut sah-sah saja asal dilakukan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Banwaslu/Panwaslu) seperti diatur dalam UU Pemilu No 10/2008.

Karena itu jadwal dan ketentuan kampanye adalah patokan yang harus dipatuhi oleh semua pihak, oleh parpol, tokoh-tokoh parpol, para pejabat, dan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat. Semua unsur di atas berkewajiban mematuhi ketentuan UU dalam hal kampanye sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Parpol adalah pihak yang melaksanakan aturan, Bawaslu yang ditugasi mengawasi dan mengontrol pelaksanaan di lapangan. Mereka diberi kewenangan untuk menentukan parpol mana yang melanggar, parpol mana yang tidak. Jika misalnya terjadi pelanggaran aturan kampanye, Bawaslu harus melaporkan pelanggaran itu kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan UU.

Sanksi dan hukuman pun sudah ditetapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terbukti. Jadi semua ketentuan yang disepakati bersama dalam UU itu harus dipatuhi dan ditegakkan seadil-adilnya. Bukan zamannya lagi hukum dibuat untuk dilanggar.

Kasus penetapan tersangka Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Polda Metro Jaya atas dasar laporan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Ini berarti Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya seperti diamanatkan UU. Kepolisian yang merespons positif laporan Bawaslu tersebut juga cukup meyakinkan kita bahwa aparat penegak hukum punya komitmen kuat menegakkan hukum.

Laporan Bawaslu ke pihak kepolisian tentang dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan PKS tentu didasari bukti-bukti kuat. Kalau tidak, Bawaslu yang akan digugat balik oleh yang bersangkutan. PKS sebagai tertuduh juga diberi hak untuk melakukan pembelaan dan pembuktian di muka hukum.

Nah yang patut kita tegaskan di sini adalah konsistensi dari Bawaslu maupun kepolisian dalam kasus-kasus lain. Andaikan yang melakukan pelanggaran kampanye itu parpol besar yang memiliki pengaruh kuat, apakah mereka juga akan melakukan hal serupa seperti kepada PKS? Jawaban normatifnya pasti iya.

Tapi ini yang patut kita uji lagi. Publik dalam hal ini masyarakat dan media massa sebagai alat kontrol akan mengawasi mereka dengan cermat. Kalau ternyata mereka "tidak berdaya" menegakkan aturan kepada parpol yang memiliki pengaruh besar, harus kita teriaki ramai-ramai.

Bawaslu dan aparat penegak hukum jangan coba-coba untuk pilih-pilih kasus karena intervensi pihak-pihak tertentu. Karena mereka berada dalam pengawasan ketat

masyarakat yang semakin cerdas membaca perilaku para pejabat publik kita. Iklim pemilu akan terasa sejuk kalau semua pihak mengikuti aturan main yang sudah disepakati bersama.

Kasus PKS hendaknya menjadi pelajaran penting bagi parpol-parpol lain agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjalankan perannya. Kita berharap 2009 akan lebih berkualitas dari pemilu-pemilu terdahulu. (Seputar Indonesia)

2. Mungkinkah Petinggi Israel Dihukum?

Serangan Israel atas Gaza terus berlangsung meski mayoritas suara dunia telah mengutuk dan menyerukan untuk dihentikan.

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pun telah mengeluarkan resolusi agar dilakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM dalam serangan. Menjadi pertanyaan apakah para petinggi Israel dapat dihukum atas dasar melakukan kejahatan internasional?

Kejahatan Internasional

Dalam hukum internasional, kejahatan internasional di saat terjadi konflik bersenjata telah dilembagakan dalam Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Kejahatan Internasional (Rome Statute on International Criminal Court).

Ada empat kategori kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), genosida, kejahatan perang, dan perang agresi. Menjadi pertanyaan apakah serangan Israel telah memenuhi satu atau beberapa kejahatan internasional tersebut.

Serangan yang dilancarkan Israel dalam hukum internasional dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan (use of force) atau yang dikenal dengan istilah jus ad bellum. Kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah jus in bello.

Dalam konteks jus ad bellum menjadi pertanyaan apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri (self defence) sebagaimana selalu diargumentasikan ataukah sebenarnya merupakan serangan ofensif? Bila serangan dikategorikan sebagai serangan ofensif, para petinggi Israel dapat dipersalahkan melakukan kejahatan internasional berupa perang agresi.

Melihat kenyataan yang terjadi, ada dua dasar untuk mengklasifikasikan serangan Israel sebagai serangan ofensif. Pertama, Israel tidak melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB tentang digunakannya kekerasan sebagai hak bela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Bahkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1860 secara nyata diabaikan dan dilanggar Israel.

Kedua, dari segi proporsionalitas dan lamanya serangan, apa yang dilakukan Israel tidak sebanding dengan peluncuran roket yang dilakukan Hamas. Sementara dari perspektif jus in bello, Israel telah banyak melakukan pelanggaran. Israel tidak membedakan antara mereka yang mengangkat senjata (combatant) dan rakyat sipil (non-combatant), terutama wanita dan anak-anak.

Selain itu, infrastruktur yang diserang pun dilakukan tanpa memilah-milah, mulai dari rumah penduduk, masjid, universitas hingga rumah sakit. Alasan Israel karena di tempat-tempat tersebut terdapat roket-roket Hamas. Ketiga, Israel telah menggunakan fosfor putih dalam serangannya yang mengenai rakyat sipil.

Keempat, apabila benar, ada suatu peristiwa di mana tentara Israel telah melakukan pembantaian atas suatu keluarga besar dengan menempatkan keluarga tersebut ke suatu gedung yang kemudian diserang oleh pesawat Israel. Keempat hal ini dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang.

Atas semua hal ini para pejabat tinggi Israel, perdana menteri, menteri pertahanan, menteri luar negeri, berikut para jenderal yang memimpin operasi militer, dapat disangka, didakwa, dan dihukum melakukan kejahatan internasional.

Pengadilan yang Berwenang

Bila memang demikian halnya, pengadilan manakah yang berwenang? Mahkamah Kejahatan Internasional (bukan Mahkamah Internasional/ MKI) memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Namun dalam kasus Israel, MKI tidak berwenang karena hingga saat ini Israel belum meratifikasi Statuta Roma.

Pengadilan di Palestina berpotensi untuk mengadili, tapi sangat tidak mungkin. Karena apakah mungkin otoritas di Israel akan mengekstradisi para petingginya ke Palestina? Para petinggi tersebut akan dianggap sebagai pahlawan, bukan pecundang. Belum lagi apakah di Palestina ada peraturan perundang-undangan yang mengancam pelaku yang melakukan kejahatan internasional?

Pengadilan di Belgia juga berpotensi untuk mengadilinya mengingat dalam peraturan perundang-undangan Belgia diatur tentang proses hukum bagi pelaku kejahatan internasional. Namun ini pun tidak akan efektif karena alasan yang sama, tidak mungkin otoritas di Israel akan mengirim para petingginya.

Alternatif lain adalah pendirian pengadilan kejahatan internasional yang bersifat ad hoc (khusus untuk mengadili suatu peristiwa) seperti International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) atau International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).

Hanya saja pendirian pengadilan kejahatan internasional yang dapat diberi nama International Criminal Tribunal for Israel (ICTI) merupakan suatu ilusi. Ilusi karena pendiriannya harus didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB sudah dapat dipastikan akan memveto resolusi semacam ini.

Impunitas

Intinya meski berbagai pihak dapat mengargumentasikan kejahatan internasional yang dilakukan oleh para petinggi Israel, para petinggi tersebut akan terbebas dari proses hukum dan hukuman (impunity). Di sinilah kelemahan hukum internasional.

Hukum internasional tidak akan efektif dalam memproses pelaku kejahatan internasional bila negaranya membenarkan tindakan tersebut. Apalagi bila negara tersebut dianggap sebagai "pemenang" dalam konflik bersenjata dan didukung oleh negara adidaya. Kekuatan (power) sangat berpengaruh terhadap siapa yang dianggap bersalah dalam hukum internasional.

Korban sipil yang berjatuh tidak akan mendapat keadilan yang semestinya. Keadilan tidak akan berpihak kepada mereka. Lalu di manakah negara seperti Amerika Serikat atau sebagian negara Eropa yang kerap menyuarakan HAM dan perlunya penindakan terhadap pelaku kejahatan internasional? (Seputar Indonesia)

3. Ujian Nasional dan Tiket Masuk ke PTN

DUNIA pendidikan lagi-lagi memunculkan persoalan baru. Meski belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, ada keinginan menjadikan hasil ujian nasional sebagai salah satu dasar seleksi ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Gagasan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional. Pasal 68 PP itu menyebutkan nilai kelulusan ujian nasional sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliah (MA) bisa menjadi salah satu dasar masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Dengan demikian, PTN tidak lagi menyodorkan soal-soal yang sudah diujikan dalam ujian nasional. PTN hanya melakukan seleksi berupa tes bakat skolastik, intelegensi, bakat, minat, dan kesehatan sesuai dengan kriteria pada satuan pendidikan.

Bagi satuan pendidikan diberi waktu transisi selama tujuh tahun untuk bisa melaksanakan ketentuan seperti diatur dalam PP Nomor 19/2009 itu.

Yang pasti, akibatnya, beban materi dan psikis siswa terus bertambah. Untuk ujian nasional yang digelar pada medio April-Mei mendatang saja, para siswa harus belajar ekstra keras. Sebab, standar kelulusan dinaikkan lagi dari 5,25 menjadi 5,50. Dana yang dikucurkan pun tidak tanggung-tanggung mencapai Rp572 miliar.

Dana sebesar itu merupakan bagian dari pagu anggaran untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp244 triliun pada tahun ini seperti diamanatkan konstitusi, yakni 20% dari APBN 2009.

Yang menjadi persoalan, apakah sebelum melaksanakan ujian nasional pemerintah sudah meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, dan akses informasi yang lengkap di seluruh Tanah Air?

Sejatinya, dengan alokasi anggaran sangat besar dalam APBN 2009, persoalan-persoalan mendasar di dunia pendidikan seperti itu sudah mulai diperbaiki dan dibenahi. Perbaikan bangunan sekolah di seluruh Indonesia haruslah menjadi prioritas utama. Sebab, bukan hal baru banyak bangunan sekolah, terutama di daerah terpencil dan daerah bencana, yang sangat tidak layak pakai sebagai wadah proses belajar-mengajar.

Karena itu, negara harus punya kemauan dan kemampuan untuk membangun dunia pendidikan yang sejajar dan setara di seluruh daerah agar ketimpangan-ketimpangan yang menganga lebar bisa diperkecil. Langkah itu penting dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi ketertinggalan satu daerah dari daerah lain. Bahkan mestinya dengan standar yang lebih tinggi lagi sehingga bangsa ini mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam konteks itulah, negara semestinya memiliki program dan kebijakan di sektor pendidikan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Perlu pula dibangun akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara untuk sektor pendidikan agar perintah konstitusi anggaran pendidikan 20% dari APBN benar-benar tepat sasaran.

Perlu diingatkan bahwa gagasan menjadikan ujian nasional sebagai syarat masuk perguruan tinggi jangan sekadar arena uji coba. Bukan masanya lagi para siswa menjadi kelinci percobaan sebuah kebijakan. Itu kalau bangsa ini tidak mau semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain. (Media Indonesia)

Jakarta, 15 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu